



Rencana Kerja Dinas Kesehatan

**TAHUN
2022**

**PEMERINTAH
KOTA CIMAHI**



KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG C LANTAI III
JL. RD. DEMANG HARJAKUSUMAH
TELP./FAX 022-6632197
KOTA CIMAHI



[HTTPS://DINKES.CIMAHIKOTA.GO.ID/](https://dinkes.cimahikota.go.id/)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian indikator kinerja yang digunakan, permasalahan yang dihadapi, serta usulan dari masyarakat pada saat Musrenbang. Rencana Kerja Tahun 2022 juga memperhatikan pada Rencana Srategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja 2022 ini tersusun atas kerjasama tim penyusun di jajaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka penyusunan rencana kerja dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyajian Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan termakasih dan penghargaan kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan rencana kerja ini.

Cimahi, 22 November 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



drg. PRATIWI, M.Kes
NIP. 196206191989012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1. Maksud	6
2. Tujuan.....	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	8
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2020.....	8
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....	43
C. ISU STRATEGIS	45
1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi	45
2. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.....	46
3. Stunting Pada Balita.....	47
4. Meningkatnya Kasus Penyakit Menular Dan Tidak Menular.	48
5. Pandemi COVID-19.....	48
6. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan	49
D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.....	53
A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	53
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH....	54
C. PROGRAM DAN KEGIATAN	57
1. Strategi.....	59
2. Kebijakan	60
3. Program, Kegiatan	61

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	96
BAB V PENUTUP.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020	8
Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran.....	9
Tabel 2. 3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Program.....	9
Tabel 2. 4 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran	10
Tabel 2. 5 Rencana Program Kegiatan dan Realisasi Tahun 2020 ...	12
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	25
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama tahun 2020.....	43
Tabel 2. 8 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020.....	44
Tabel 2. 9 Usulan Musrenbang Bidang Kesehatan Tahun 2022	50
Tabel 2. 10 Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022	51
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	57
Tabel 3. 2 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2019-2020	58
Tabel 4. 1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Sumber Anggaran.....	96
Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan RKPD.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2020	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2021 dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Dalam sistem perencanaan daerah, rencana kerja SKPD mempunyai fungsi penting karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara usulan tingkat kelurahan dan kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat Dinas serta kajian di tingkat Kota, dan juga mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kota, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen rancangan Renja 2022 ini, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Renja SKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Awal tahun 2020 seluruh dunia dihadapkan pada kasus pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Wabah ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai sendi kehidupan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, akibat dari wabah ini mempengaruhi proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan tahun 2020, begitu pula dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan 2022 ini tentunya harus memperhatikan berbagai kebijakan dan peraturan yang harus diakomodir oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah daerah di kabupaten dan kota dalam penanggulangan wabah tersebut.

Imbas pandemi COVID-19, saat ini pemerintah pusat, provinsi dan daerah masih tetap fokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pusat untuk tahun 2022 masih mencakup pada tujuh prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2024 yakni penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah,

peningkatan sumber daya manusia, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim, kemudian stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai RKP tahun 2021.

Seluruh strategi tersebut dapat disusun dalam dokumen perencanaan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya di tahun 2022. Dengan adanya dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan untuk mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik dari tahun 2021, sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tetap tercapai sesuai dengan rencana.

B. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
 19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
 20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
 21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022

(Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 630 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjabarkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu dua tahun terakhir dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.

2. Tujuan

- a. Melakukan analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 terhadap indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Mengakomodir berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan proses pembangunan bidang kesehatan di Kota Cimahi khususnya dan pembangunan kesehatan di Indonesia.
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan.
- d. Dokumen Rencana Kerja sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2022.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Telaah Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

- A. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2020

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program serta kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta kegiatan dalam renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan di tahun 2020. Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengelola Anggaran dari berbagai sumber antara lain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi dan APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 128.074.136.291,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 93.569.980.291,- (73.05%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 34.504.156.000,- (26.94%). Adapun rincian lengkap untuk anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.504.156.000,-
2	BELANJA LANGSUNG	93.569.980.291,-
	TOTAL	128.074.136.291,-

Anggaran Belanja Langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang, Sekretariat dan 13 (tiga belas) Puskesmas selama tahun 2020. Sumber anggaran berasal dari APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) APBD Provinsi (40% Premi iuran PBI Daerah integrasi dengan JKN) dan APBD Kota Cimahi serta Dana Kapitasi JKN bagi 13 Puskesmas. Adapun untuk rincian pagu anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 berdasarkan sumber anggaran ada pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1.	APBN	33.613.160.000,-	26,24
	a. DAK FISIK	7.634.546.000,-	
	b. DAK NON FISIK	24.308.424.630,-	
	c. DID	1.670.190.250,-	
2.	APBD PROVINSI	9.676.800.000,-	7,55
3.	APBD KOTA	61.303.780.222,-	47,86
4.	KAPITASI JKN	18.803.876.947,-	14,68
5.	DBHCHT	4.675.333.242,-	3,65
	TOTAL	128.072.951.291,-	100,00

Berdasarkan tabel diatas prosentase sumber anggaran terbesar berasal dari anggaran APBD Kota Cimahi (47.86 %), anggaran kapitasi JKN di Puskesmas (14,68 %). Sementara itu anggaran yang berasal dari APBD Provinsi sebesar 7,55%, sedangkan anggaran yang berasal dari pusat/APBN pada tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar 26.24 %.

Anggaran sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang dan sekretariat serta di 13 Puskesmas. Pada tahun 2020 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 6 program yaitu 3 program di Bidang dan 3 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat. Adapun jumlah besaran anggaran di bidang sebanyak Rp. 89.556.613.461,- dan di sekretariat sebesar Rp. 4.013.366.830,-. Berikut tabel anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan program yang dikelola pada tahun 2020.

Tabel 2. 3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
BIDANG		89.556.613.461,-
1.	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	27.672.976.350,-
2.	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	50.829.149.345,-
3.	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	11.054.487.766,-
SEKRETARIAT (PENDUKUNG)		4.013.366.830,-
5.	Program peningkatan sarana dan	3.877.179.330,-

	prasarana aparatur	
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.937.500,-
7.	Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	60.250.000,-
TOTAL (BIDANG + SEKRETARIAT)		93.569.980.291

Anggaran belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp. 93.569.980.291,-, realisasi terhadap program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 75.925.097.602,- atau 81,14% naik 1.54% dari tahun 2019 (79,60%). Adapun rincian realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			RP	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.504.156.000,-	34.146.205.015,-	98,96
	BELANJA LANGSUNG	93.569.980.291,-	75.925.097.602,-	81,14
1.	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	27.672.976.350,-	21.503.454.899,-	77,71
2.	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	50.829.149.345,-	42.928.019.475,-	84,46
3.	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	11.054.487.766,-	7.783.742.632,-	70,41
5.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.877.179.330,-	3.574.283.096,-	92,19
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.937.500,-	75.347.500,-	99,22
7.	Program	60.250.000,-	60.250.000,-	100,00

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			RP	%
	peningkatan kapasitas aparatur sipil Negara			
	TOTAL	128.074.136.291,-	110.071.302.617,-	85,94

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 sebesar Rp. 128.074.136.291,- dengan realisasi belanja seluruhnya sebesar Rp. 110.071.302.617,- (85.94 %) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.504.156.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.146.205.015,- (98.96%) dan belanja langsung sebesar Rp 93.569.980.291,-. dengan realisasi sebesar Rp. 75.925.097.602,- atau (81,14%). Realisasi kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Rencana Program Kegiatan dan Realisasi Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target renstra PD pada tahun 2017 - 2022 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Persentase peningkatan kategori keluarga sehat	9	8.825.000.000	3,12	9.863.119.559	5	27.672.976.350	3,12	21.503.454.899	62,40	77,71
		Prevalensi stunting pada baduta	12,04		6,98		12,04		9,81	-	138,12 %	
1.	Pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	950.000.000	95,1	411.894.670	100,0	393.430.000	88,19	388.155.000	88,19	98,66
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100		97,3		100,0		94,21	-	94,21	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		94,9		100,0		91,67	-	91,67	
2.	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	36	440.000.000	62,2	175.891.000	35	141.195.000	15,40	27.510.000	44,00	19,48
		Persentase Ibu hamil KEK	2,36		3,53		20		3,15	-	182,50	
3.	Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	450.000.000	69,9	254.460.000	100,0	3.661.500	87,59	3.661.500	87,59	100,00
4.	Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	375 anak	125.000.000	75,0	119.959.150	75,00	-	-	-	-	-

5.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	75	1.000.000.000	50,9	712.822.900	65,00	801.400.000	52,45	773.797.000	80,69	96,56
		Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri	80%		31,7		60,00		57,69		96,15	
6.	Peningkatan KIE dampak asap rokok	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	13%	375.000.000	18,2	128.903.600	9,00	82.225.000	9,81	82.225.000 -	109,00	100,00
		Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	13%		7,85		9,00		7,41		82,30	
7.	Peningkatan Promosi obat bahan alami asli Indonesia dan didalam dan diluar negeri	Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA	75 RW	30.000.000	-	-	15,00	-	-	-	-	
8.	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat	100%	62.000.000	100	57.850.000	100	3.000.000	50,00	3.000.000 -	50,00	100,00
		Persentase sarana IRTP yang diaudit	100%		100		100		37,00		37,00	
9.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	48 unit	53.000.000	23,0	48.314.000 -	44	194.898.500	-	9.562.500 -	-	4,91
		Jumlah sarana pelayanan	48 unit		42,0		44		33,00		75,00	

		kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan										
10.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar	85%	200.000.000	82,2	69.977.000 -	83	2.675.000	76,20	1.500.000 -	91,80	56,07
		Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes	90%		36,9		80		55,48		69,35	
11.	Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	86%	425.000.000	95,8	125.840.864 -	84	229.238.000	97,76	214.163.070 -	116,38	93,42
		Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	72,5 %		79,9		71,5		80,00		111,89	
12.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	68	390.000.000	68,0	64.711.000	66,00	97.352.000	67,72	97.352.000	102,61	100,00
13.	Pelayanan pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	600.000.000	135,2	128.805.000	100	1.706.118.851	81,25	1.697.596.250 -	81,25	99,50
		Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TB			64,6		100		48,55		51,11	
14.	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik	Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥95%	375.000.000	89,1	126.022.300	≥95	278.860.350	88,73	238.496.600	93,40	85,53
15.	Penanggulangan HIV AIDS	Cakupan Pelayanan kesehatan orang	100%	575.000.000	69,1	170.225.000	100	783.843.799	79,45	468.652.783	79,45	59,79

		dengan risiko terinfeksi HIV										
16.	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,00 %	480.000.000	93,6	57.461.500	93	20.825.000	85,91	20.825.000	92,38	100,00
17.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			1.185.000.000		593.638.475		455.695.220		450.876.316		98,94
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100%		90,1		100		69,44	221.619.596	69,44	153,44
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100%		72,9		100		37,82	10.450.000	37,82	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	100%		98,4		100		100,8	16.145.000	100,81	
18.	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100%	510.000.000	114,3	181.520.600	100	491.535.000	119,1	472.185.000	119,10	96,06
19.	Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kerja dan Olah raga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	15 pos	250.000.000	11,0	115.228.000	10	31.112.500	13,00	31.112.500	130,00	100,00
		Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	90%		94,5	-	85		89,51	-	105,31	
20.	Peningkatan kesehatan lansia	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	150.000.000	70,2	121.876.000	100	1.750.000	63,92	1.750.000	63,92	100,00
21.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi	Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun	≥ 2/100000	200.000.000	4,00	147.212.500	≥ 2/100000	49.945.000	1,00	46.225.000	150	92,55

	Penanggulangan Wabah											
22.	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80%	12		6,00	6.050.506.000	10,00	21.904.215.630	6,00	16.474.809.380	60	75,21
2.	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	100%	23.899.168.000	91,7	30.041.969.765	91,70	50.829.149.345	93,67	42.928.019.475	102,15	84,46
1.	Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi			4.600.000.000		13.264.697.772	95	30.703.459.398		25.532.044.337	-	
		Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100%	4.600.000.000	85,3	8.524.270.740	100	22.762.711.298	100,0	19.156.372.390	100,00	84,16
		Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)	100%		99,9	4.740.427.032	100	7.940.748.100	100,0	6.375.671.947	100,00	
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	100%	1.926.648.000	16,8	1.866.904.126	100	2.323.843.557	72,45	1.754.056.976	72,45	75,48

3.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	100%	829.584.000	77,5	541.460.121	100	622.840.571	72,45	555.589.570	72,45	89,20
4.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup	100%	1.332.720.000	53,3	1.147.141.465	100	1.187.534.674	90,00	1.132.265.365	90,00	95,35
5.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	100%	1.648.656.000	14,2	1.371.914.430	100	1.775.182.787	81,96	1.454.934.839	81,96	81,96
6.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	100%	2.016.000.000	24,6	1.663.401.611	100	1.538.486.793	86,19	1.380.801.213	86,19	89,75
7.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka	100%	1.828.368.000	19,3	1.590.956.808	100	1.803.264.530	95,00	1.608.208.032	95,00	89,18

	Puskesmas Padasuka											
8.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah	100%	1.784.304.000	29,2	1.234.755.457	100	1.640.206.894	82,00	1.311.760.316	82,00	79,98
9.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan	100%	1.653.048.000	42,1	1.381.396.080	100	1.415.064.947	85,00	1.256.756.461	85,00	88,81
10.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih	100%	1.530.000.000	32,0	1.343.854.116	100	1.488.927.267	95,00	1.356.324.103	95,00	91,09
11.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeureum	100%	1.745.496.000	25,7	1.593.794.430	100	2.064.377.722	90,00	1.753.811.161	90,00	84,96

12.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber	100%	991.008.000	43,8	771.393.198	100	946.027.412	70,89	767.209.645	70,89	81,10
13.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah	100%	1.093.104.000	80,9	952.174.515	100	1.166.780.213	85,00	950.846.070	85,00	81,49
14.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah	100%	920.232.000	33,2	762.415.180	100	831.339.580	100,0	796.899.893	100,00	95,86
15.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan jaringannya	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100	-	14,2	141.495.822		-	-	-	-	-
16.	Jaminan Persalinan	Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN)	100%	-	87,3	414.214.634	100	1.321.813.000	100,0	1.316.511.494	100,00	99,60

3.	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	92,31	5.870.000.000	92,31	6.976.226.227	84,62	11.054.487.766	92,31	7.783.742.632	109,09	70,41
1.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya	13 PKM	500.000.000	2,00	346.563.651	3,00	80.700.000	2,00	80.181.191	66,67	99,36
2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase nakes yang terlatih	100%	285.000.000	83,3	197.141.800	100%	8.987.500	-	8.987.500	-	100,00
3.	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi	13 PKM	860.000.000	3,00	1.127.523.445	0	921.850.002	-	550.313.550	-	59,70
		Jumlah Puskesmas re-akreditasi	13 PKM		3,00		-		4		-	
4.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	2.200.000.000	87,5	2.890.661.431	100	3.107.375.328	100,0	3.077.093.195	100,00	99,03
		Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas	100%		100		100		90,00		90,00	
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana (Puskemas Rawat inap)	14 pkm dan pustu, 1 pkm rawat	852.000.000	1,00	1.353.714.900	4	6.007.832.675	3,00	3.270.669.690	75,00	54,44

			inap									
		Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas	11 kendaraan (3 ambulans + 8 motor)		-	-	4 motor		-		-	
6.	Pengadaan alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan	100%	775.000.000	100	968.648.000	100	854.178.261	100	732.483.506	100,00	85,75
7.	Pengembangan dan pemutakhiran Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu	100%	398.000.000	84,6	91.973.000	90	73.564.000	84,71	73.001.500	99,24 %	99,24
4.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	4.162.000.000	96,43	3.280.773.444	100	3.877.179.330	100,0	3.574.283.096	100,00	92,19
		Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%		100		100		100,0		100,00	
1.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan	103.500.000	11,0	70.760.000	12,00	164.119.500	12,00	159.346.457	100,00	97,09
2.	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan	750.000.000	12,0	386.406.725	12,00	436.641.350	12,00	375.673.235	100,00	86,04
		Jumlah bulan jasa	12		12,0		12,00		12,00	-	100,00	

		listrik	bulan									
		Jumlah bulan jasa air	12 bulan		12,0		12,00		12,00	-	100,00	
3.	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	150.000.000	12,0	75.365.725	12,00	164.912.500	12,00	153.280.450	100,00	92,95
		Jumlah bulan penggandaan	12 bulan		12,0		12,00		12,00	-	100,00	
4.	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan	2 unit	1.150.000.000	-	1.093.903.150	4		-	-	-	-
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	116 Unit		108		27	874.999.999	27,00	723.098.890	100,00	82,64
		Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	68 Unit		108		27		27,00	-	100,00	
5.	Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah meja	94 Unit	115.000.000	1,00	1.034.000	8	-	-	-	-	-
		Jumlah kursi	100 Unit		-		8		-		-	
		Jumlah lemari	26 Unit		2,00		4				-	
		Jumlah set partisi	1 Set		-		0		-		-	
6.	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit komputer	58 Unit	200.000.000	4,00	205.739.780	5	392.761.000	14,00	385.451.600	280,00	98,14
		Jumlah unit printer	55 Unit		1,00		3		5,00	-	166,67	
		Jumlah unit server	3 Unit		-		1		-	-	-	
		Jumlah unit ac	18 Unit		3,00		2		2,00		100,00	
7.	Penyediaan peralatan	Jumlah set peralatan rumah tangga	3 Set	8.500.000	3,00	4.927.000	3	4.650.000	1,00	4.650.000	33,33	100,00

	rumah tangga											
8.	Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	8 Dokumen	25.000.000	2,00	51.300.000	2	-	-	-	-	-
9.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan	70.000.000	12	52.051.272	12	98.880.000	12,00	69.228.128	100,00	70,01
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	70.000.000	12	59.886.700	12	192.005.000	12,00	305.690.500	100,00	159,21
11.	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	725 Kali	415.000.000	599	479.749.092	725	130.235.763	335	122.904.891	46,21	94,37
		Jumlah perjalanan caraka	80 Kali		5,00		80		-	-	-	
12.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan	390.000.000	12	369.856.000	12	653.500.000	12,00	617.390.000	100,00	94,47
13.	Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan	490.000.000	12,0	429.794.000	12	764.474.218	12,00	662.218.945	100,00	86,62
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	85 (A)	501.000.000	78,1	153.865.000	79 (BB)	75.937.500	78,05	75.347.500	104,07	99,22
		Persentase capaian penyerapan anggaran	85%		79,56		85		85,85	-	101,00	
1.	Penyusunan Laporan Inventaris	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	1 dokumen	55.000.000	1	9.700.000	1	4.750.000	1,00	4.200.000	100,00	88,42

	Barang											
2.	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	66.000.000	1	27.117.000	1	11.550.000	1,00	11.510.000	100,00	99,65
3.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			110.000.000		32.093.000		39.647.000		39.647.000		100,00
		Jumlah dokumen RENSTRA	1 dokumen		-		1		-			
		Jumlah dokumen RENJA	2 dokumen		2		2		2,00			
4.	Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	4 dokumen	190.000.000	4	34.036.000	4	19.990.500	4,00	19.990.500	100,00	100,00
		Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen		1		1		1,00	-	100,00	
		Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen		1		1		1,00	-	100,00	
6.	Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	Persentase ASN yang dibina	100%	200.000.000	100	87.500.000	100	60.250.000	36,74	60.250.000	36,74	100,00
1.	Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai	Jumlah ASN yang dibina	100%	200.000.000	100	87.500.000	100	60.250.000	45,71	60.250.000	45,71	100,00
		Jumlah ASN yang terlatih	100%		100		100		27,78	-	27,78	
JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES						50.403.453.995		93.569.980.291	59,96	75.925.097.602		

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target renstra PD pada tahun 2017 - 2022 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun n-1 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Persentase peningkatan kategori keluarga sehat	9	5	3,12	62,40			100,00
		Prevalensi stunting pada baduta <	12,04	12,04	9,81	138,12%			100,00
1.	Pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100,00	88,19	88,19			100,00
		Cakupan Pelayanan	100	100,00	94,21	94,21			100,00

		kesehatan ibu bersalin							
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100,00	91,67	91,67			100,00
2.	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	36	35	15,40	44,00			100,00
		Persentase Ibu hamil KEK	2,36	20	3,15	182,50			100,00
3.	Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100,00	87,59	87,59			100,00
4.	Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	375 anak	75,00	-	-			100,00
5.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	75%	65,00	52,45	80,69			100,00
		Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan	80%	60,00	57,69	96,15			100,00

		mandiri							
6.	Peningkatan KIE dampak asap rokok	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	13%	9,00	9,81	109,00			100,00
		Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	13%	9,00	7,41	82,30			100,00
7.	Peningkatan Promosi obat bahan alami asli Indonesia didalam dan diluar negeri	Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA	75 RW	15,00	-	-			100,00
8.	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat	100%	100	50,00	50,00			100,00
		Persentase sarana IRTP yang diaudit	100%	100	37,00	37,00			100,00

9.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	48 unit	44	-	-			100,00
		Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan	48 unit	44	33,00	75,00			100,00
10.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar	85%	83	76,20	91,80			100,00
		Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes	90%	80	55,48	69,35			100,00
11.	Pengkajian Pengembangan	Persentase akses penduduk terhadap	86%	84	97,76	116,38			100,00

	lingkungan sehat	air minum berkualitas							
		Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	72,5 %	71,5	80,00	111,89			100,00
12.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	68	66,00	67,72	102,61			100,00
13.	Pelayanan pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100	81,25	81,25			100,00
		Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TB		100	48,55	51,11			100,00
14.	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik	Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥95%	≥95	88,73	93,40			100,00
15.	Penanggulangan HIV AIDS	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	100	79,45	79,45			100,00
16.	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,00%	93	85,91	92,38			100,00

17.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100%	100	69,44	69,44			100,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100%	100	37,82	37,82			100,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	100%	100	100,81	100,81			100,00
18.	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100%	100	119,10	119,10			100,00
19.	Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kerja dan Olah raga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	15 pos	10	13,00	130,00			100,00
		Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	90%	85	89,51	105,31			100,00
20.	Peningkatan kesehatan lansia	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan	100%	100	63,92	63,92			100,00

		skrining kesehatan sesuai standar							
21.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi penanggulangan Wabah	Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun	≥ 2/100000	≥ 2/100000	1,00	150			100,00
22.	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80%	12	10,00	6,00	60			100,00
2.	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	100%	91,70	93,67	102,15			
1.	Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100%	100					100,00
		Persentase pembiayaan pelayanan	100%	100					100,00

		kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)							
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	100%	100	72,45	72,45			100,00
3.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	100%	100	72,45	72,45			100,00
4.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di	100%	100	90,00	90,00			100,00

		puskesmas Citeureup							
5.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	100%	100	81,96	81,96			100,00
6.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	100%	100	86,19	86,19			100,00
7.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka	100%	100	95,00	95,00			100,00

8.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah	100%	100	82,00	82,00			100,00
9.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan	100%	100	85,00	85,00			100,00
10.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih	100%	100	95,00	95,00			100,00
11.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di	100%	100	90,00	90,00			100,00

		puskesmas Cibeureum							
12.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber	100%	100	70,89	70,89			100,00
13.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah	100%	100	85,00	85,00			100,00
14.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah	100%	100	100,00	100,00			100,00

15.	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan jaringannya	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100		-	-			100,00
16.	Jaminan Persalinan	Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN)	100%	100					100,00
3.	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	92,31	84,62	92,31	109,09			
1.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya	13 PKM	3,00	2,00	66,67			

	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase nakes yang terlatih	100%	100%	-	-			
2.	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi	13 PKM	0	-	-			
		Jumlah Puskesmas re-akreditasi	13 PKM	4	-	-			
3.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	100	100,00	100,00			
		Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas	100%	100	90,00	90,00			
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana	14 pkm dan pustu, 1 pkm rawat inap	4	3,00	75,00			

		(Puskemas Rawat inap)							
		Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas	11 kendaraan (3 ambulans + 8 motor)	4 motor	-				
5.	Pengadaan alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan	100%	100	100,00	100,00			
6.	Pengembangan dan pemutakhiran Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu	100%	90	84,71				
4.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100	100,00	100,00			

		Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	100	100,00	100,00			
1.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan	12,00	12,00	100,00			
2.	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan	12,00	12,00	100,00			
		Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan	12,00	12,00	100,00			
		Jumlah bulan jasa air	12 bulan	12,00	12,00	100,00			
3.	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penggandaan	12 bulan	12,00	12,00	100,00			
4.	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan	2 unit	4	-	-			
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	116 Unit	27	27,00	100,00			
		Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	68 Unit	27	27,00	100,00			

5.	Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah meja	94 Unit	8	-	-			
		Jumlah kursi	100 Unit	8	-	-			
		Jumlah lemari	26 Unit	4		-			
		Jumlah set partisi	1 Set	0	-	-			
6.	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit komputer	58 Unit	5	14,00	280,00			
		Jumlah unit printer	55 Unit	3	5,00	166,67			
		Jumlah unit server	3 Unit	1	-	-			
		Jumlah unit ac	18 Unit	2	2,00	100,00			
7.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	3 Set	3	1,00	33,33			
8.	Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	8 Dokumen	2	-	-			
9.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan	12	12,00	100,00			
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan	12 bulan	12	12,00	100,00			

		minuman							
11.	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	725 Kali	725	335	46,21			
		Jumlah perjalanan caraka	80 Kali	80	-	-			
12.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12	12,00	100,00			
13.	Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan	12	12,00	100,00			
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	85 (A)	79 (BB)	78,05	104,07			
		Persentase capaian penyerapan anggaran	85%	85	85,85	101,00			
1.	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	1 dokumen	1	1,00	100,00			
2.	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	1	1,00	100,00			
3.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA	1 dokumen	1	-	-			
		Jumlah dokumen RENJA	2 dokumen	2	2,00	100,00			

4.	Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	4 dokumen	4	4,00	100,00			
		Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen	1	1,00	100,00			
		Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen	1	1,00	100,00			
6.	Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	Persentase ASN yang dibina	100%	100	36,74	36,74			
1.	Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai	Jumlah ASN yang dibina	100%	100	45,71	45,71			
		Jumlah ASN yang terlatih	100%	100	27,78	27,78			

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan mulai dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (IKU) hingga indikator tujuan Indeks Kesehatan. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah sebesar 82,91 melebihi dari yang ditargetkan sebesar 82,51. Sementara itu untuk pengukuran kinerja dari sasaran strategi akan diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang terdiri dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat. Berikut tabel hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan di tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	% REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	101/100.000 KH	115,6	85,54	Tidak Tercapai
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7 / 1000 KH	6,6	105,71	Tercapai, Melebihi Target
		Indeks Keluarga Sehat	0,41 %	0,22	53,65	Tidak Tercapai

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH (12 kasus), menurun sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2019 yaitu 13 Kasus 120,26/100.000 KH. Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 6,66/1000 KH meningkat menjadi 5,83/1000 KH (69 kasus), meningkat sebanyak 5 kasus dibanding tahun 2019 yaitu 64 kasus. Kemudian untuk hasil capaian indikator ketiga dalam IKU Dinas Kesehatan adalah Indeks Keluarga Sehat dengan hasil capaian tahun 2020 sebesar 0.22, masih dibawah target 0,41.

Hasil capaian Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi antara $91\% \leq 100\%$ untuk indikator kinerja AKB, capaian kinerja tinggi antara $76\% \leq 90\%$ untuk AKI, dan capaian kinerja rendah antara $66\% \leq 75\%$ untuk indikator Indeks Keluarga Sehat. Dari 3 (tiga) indikator Kinerja pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sudah memenuhi target yaitu AKB dengan 6,66/1000 KH dari 7/1000 KH. Sementara target 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis belum mencapai target yaitu AKI dengan capaian 115,81/100.000 KH dari target 101/100.000 KH dan Indeks keluarga Sehat (IKS) 0,22 dari target 0,41. Capaian indikator kinerja AKI tahun 2020 sebesar 85,33% mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,81% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 81,52%. Capaian indikator kinerja AKB tahun 2020 adalah 104,86% mengalami penurunan sebesar 13,03% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 117,89%. Sedangkan capaian indikator indeks keluarga sehat tahun 2020 adalah 53,66% mengalami penurunan sebesar 15,09% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 68,75%.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2019, menjadi kinerja Dinas Kesehatan. Berikut ini capaian kinerja SPM bidang kesehatan tahun 2018-2020:

Tabel 2. 8 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET (%)	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	94,66	95,09	88,19
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	96,24	97,31	94,21
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	94,42	94,95	91,67
4	Pelayanan kesehatan balita	100	48,39	53,93	60,24
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100,00	69,94	87,59
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	90,27	90,08	69,44
7	Pelayanan kesehatan pada	100	58,78	70,26	63,92

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET (%)	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
	usia lanjut				
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	65,65	72,96	37,82
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	96,80	98,36	100,81
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	79,88	114,32	119,1
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	49,71	74,06	48,55
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100	60,98	69,02	79,45

C. ISU STRATEGIS

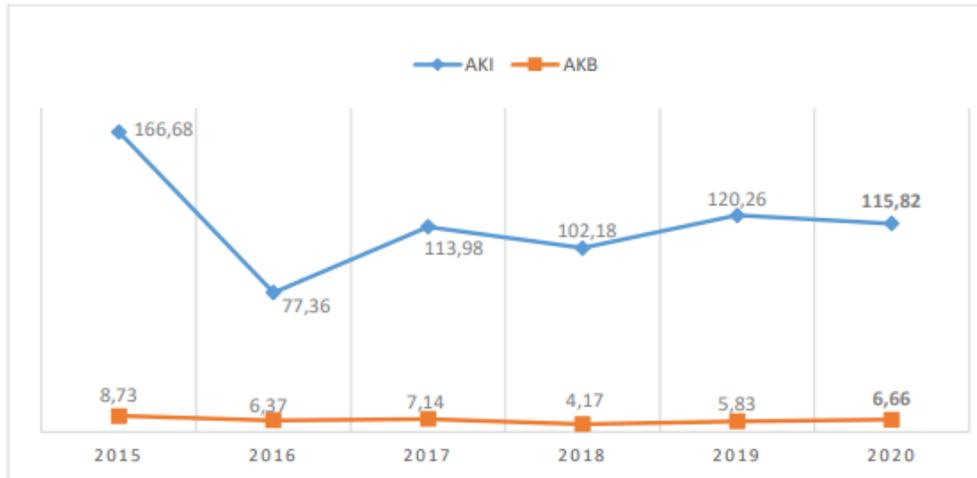
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tidak terlepas dari berbagai isu penting baik di tingkat nasional maupun regional (provinsi) terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan menjalankan 5 (lima) program strategis yaitu : peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS); dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Berikut uraian mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan program di Dinas Kesehatan.

1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif.



Gambar 2. 1 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2020

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH (12 kasus), menurun sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2019 yaitu 13 Kasus 120,26/100.000 KH. Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 6,66/1000 KH meningkat menjadi 5,83/1000 KH (69 kasus), meningkat sebanyak 5 kasus dibanding tahun 2019 yaitu 64 kasus. Penyebab Kematian Ibu terbesar adalah penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, perdarahan, infeksi dan hipertensi, Sedangkan penyebab kematian terbesar adalah asfiksia dan BBLR. AKI dan AKB yang masih fluktuatif dan menjadi permasalahan kesehatan di Kota Cimahi perlu mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai.

AKI dan AKB perlu mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai, karena berdasarkan target RPJMD untuk AKI adalah 115,2/100.000 KH dan AKB 6,4/1000 KH.

2. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Capaian SPM masing-masing setiap indikator jenis layanan terdapat pada tabel 8, dapat dilihat bahwa 10 dari 12 indikator belum mencapai target 100% yaitu indikator Pelayanan kesehatan ibu hamil 88,19%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 94,21%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 91,67%, Pelayanan kesehatan balita 60,24%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 87,59%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 69,44%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 63,92%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 37,82%, Pelayanan kesehatan orang terduga TB 48,55%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) 79,45%.

SPM Bidang Kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Karena itu perlu upaya yang lebih optimal dan terkoordinasi agar pencapaian tersebut sesuai target.

3. Stunting Pada Balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Penyebab dari stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab stunting. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi. Angka stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2020 sebesar

10,89% meningkat sebesar 1,83% dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,06%. Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 31,1%. Walaupun demikian stunting tetap menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatnya Kasus Penyakit Menular Dan Tidak Menular.

Upaya pengendalian penyakit menular difokuskan pada penurunan prevalensi kasus penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 482 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 587 kasus. Kasus DBD mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 1020 kasus, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 433 kasus.

Sementara itu untuk penyakit tidak menular, prevalensi Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, begitu pula dengan permasalahan kesehatan jiwa. Jumlah kasus DM meningkat, pada tahun 2019 terdapat 7604 kasus, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 10.640 kasus. Sedangkan untuk kasus Hipertensi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 terdapat 20.600 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 16.306 kasus. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular (PTM). Keadaan ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat dampak yang ditimbulkannya serta dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

5. Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, menyebabkan perubahan diberbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga,

pelaksanaan program-program bidang kesehatan terfokus pada penanganan COVID-19. Pada tahun 2020 Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi sebanyak 2095 kasus, pasien sembuh 1428 kasus, Orang Tanpa Gejala 12.169 kasus, jumlah kematian 57 kasus.

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukung. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap *level* intervensi. Perlu melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan *contact tracing* dan *tracking* (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta pelaksanaan vaksinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

6. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Capaian kepesertaan JKN Kota Cimahi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 93,67% meningkat sebesar 1,97% dibandingkan tahun 2019 yaitu 91.70%. Pencapaian UHC (Universal Health Coverage) di Kota Cimahi perlu menjadi prioritas, ketika UHC tercapai maka masyarakat Kota Cimahi akan mendapatkan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan dan masyarakat yang belum terdaftar bisa diajukan langsung sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran jika memerlukan pelayanan kesehatan. Percepatan UHC ini memerlukan ketersediaan data masyarakat miskin dan tidak mampu yang update dan valid dalam rangka perhitungan peserta PBI, dimana premi dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pencapaian UHC di Kota Cimahi perlu menjadi prioritas. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar secara mandiri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu ketersediaan data masyarakat kurang mampu yang valid sangat diperlukan dalam rangka perhitungan peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang preminya dibayar Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan lintas sektor. Melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan terdapat usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat dan lintas sektor yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik.

Perencanaan yang bersifat bottom up ini akan mengkomodir usulan-usulan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di dinas kesehatan. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 tingkat Kecamatan se-Kota Cimahi untuk perencanaan kegiatan tahun 2022, didapatkan beberapa usulan masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 2. 9 Usulan Musrenbang Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Kegiatan	Lokasi	Alasan
1.	Pengembangan pembiayaan kesehatan : - Pembiayaan SKTM masih tinggi - Pembiayaan di RS belum efisien. - Penambahan kuota KIS - Keterkaitan lintas sektor : Kelurahan, Kecamatan, DINSOSP2KBP3A	Cimahi	Optimalisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN. Tingginya peserta yang menunggak iuran pada segmen PBPU Perlu ditingkatkannya keikutsertaan segmen PPU dalam program JKN
2.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Cimahi	Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di masyarakat
3.	Penanggulangan HIV AIDS, bahaya Narkoba - Meningkatnya Kasus HIV AIDS - Keterkaitan lintas sektor : BNN Kota Cimahi, Disdikpora	Cimahi	Kurangnya pengetahuan tentang HIV AIDS, bahaya naroba dan meningkatnya perilaku tidak sehat / penyimpangan perilaku, seperti penyalahgunaan narkoba (penasun, obat-obatan)

Tabel 2. 10 Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

USULAN MUSYAWARAH KECAMATAN			RENJA DINAS KESEHATAN		
No	Kelompok Usulan	Lokasi	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
1.	- Pelayanan JAMKESMAS, JAMKESDA, JAMPERSAL DAN BPJS - Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Penambahan Kuota KIS)	Kec Cimahi Utara : Cibabat, Pasirkaliki Kec Cimahi Tengah : Semua Kelurahan Kec Cimahi Selatan : Cibeureum, Melong, Cibeber, Leuwigajah, dan Utama	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kec Cimahi Utara : Pasir Kaliki dan Citeureup Kec Cimahi Tengah : Semua Kelurahan Kec Cimahi Selatan :	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
3.	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	Kec Cimahi Utara: Cipageran dan Pasir Kaliki Kec Cimahi Tengah : Padasuka, Cimahi dan Baros Kec Cimahi Selatan : Kec Cimahi Selatan : Leuwigajah dan Melong	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS

Berdasarkan hasil usulan musrenbang di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di setiap kecamatan sangat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan Pelayanan JKN, penambahan kepesertaan, penyuluhan kesehatan tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2022 maka usulan-usulan tersebut kemudian disandingkan dengan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Renstra dinas kesehatan tahun 2017-2022.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2022 memasuki tahun kelima dari Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022. Sejak tahun 2021 Renstra Dinas Kesehatan mengalami perubahan untuk periode dua tahun terakhir yaitu 2021-2022 mengikuti RPJMD Kota Cimahi. Seperti kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target akhir pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting agar perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah, menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan, sehingga perlu

adanya penekanan sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan rencana kerja tahunan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan hingga musrenbang nasional. Pemerintah pusat telah menyiapkan strategi dalam upaya perbaikan akibat wabah pandemik ini.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2022, Program pembangunan Daerah selaras dengan tujuh prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah. Prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental. Prioritas nasional kelima, memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan

infrastruktur pelayanan dasar, kemudian, prioritas keenam untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terutama penanganan limbah B3 medis pasca pandemi covid 19 serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat. Terakhir, prioritas ketujuh, adalah memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diberi kewenangan dalam penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau reconfusing perubahan alokasi penggunaan APBD. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 tidak terlepas dari tema pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu “Pemulihan ekonomi“, dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah yaitu terdiri dari:

1. Reformasi sistem kesehatan,
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi,
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan,
4. Reformasi sistem perlindungan sosial,
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan.
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana,
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah,
8. Gerakan membangun desa,
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara,
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup,
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Adapun issue strategis di tahun 2022 untuk pembangunan daerah di provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi birokrasi

Berkaitan dengan program dan kegiatan prioritas yang merupakan target pembangunan dalam RPJMN IV tidak terlepas dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Salah satunya dibidang kesehatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk dilanjutkan dalam periode pembangunan selanjutnya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melanjutkan Pembangunan di bidang kesehatan, antara lain untuk :

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan
3. Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4. Mempercepat Penurunan Stunting
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Terdapat beberapa program kegiatan nasional yang merupakan program pembangunan kesehatan untuk tahap selanjutnya, akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan wujud dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi untuk mendukung pencapaian Misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul”** memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selama periode 5 tahun, Dinas Kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui misi dan misi dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan yang ada dalam RPJMD dan RPJPD kota Cimahi.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan renja tahun 2022 tidak terlepas dari Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 83.12%. Indeks Kesehatan merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. Indeks kesehatan merupakan indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Hasil capaian untuk IPM Jawa Barat dan Kota Cimahi tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 72.09 dan 77,83, hasil ini berada diatas capaian IPM Nasional yaitu 71.94. Sedangkan untuk sasaran renja Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui 2 (tiga) yaitu Ratio kematian ibu dan Ratio kematian bayi. Berikut adalah tabel dari tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2022.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Ratio Kematian Ibu	115,5
				Ratio Kematian Bayi	6,4

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia khususnya di Kota Cimahi tidak terlepas dari komitmen global untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan derajat kesehatan manusia Indonesia. Komitmen global bersama saat ini merupakan upaya melanjutkan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Capaian indikator SDGs di Kota Cimahi tahun 2020 yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian adalah pada

indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi (37,82%), Persentase ibu hamil KEK (52,94), Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat (62,40), dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (79,45). Keempat indikator tersebut capaiannya masih jauh dari yang ditargetkan, dengan demikian untuk di tahun 2022 perlu dibuatkan rencana aksi yang lebih aplikatif dan efektif agar target-target dari indikator SDGs dapat dicapai secara optimal. Berikut hasil pencapaian indikator SDGs dalam bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020.

Tabel 3. 2 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	INDIKATOR KOTA	TAHUN 2020		
		TARGET	CAPAIAN	% KINERJA
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	92,0	93,67	101,82
2.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	94,21	94,21
3.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,0	85,91	92,38
4.	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	84,0	97,76	116,38
5.	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	71,5	80,00	111,89
6.	Rasio Rumah Layak Huni (Persentase Rumah Sehat)	66	67,72	102,61
7.	Prevalensi kurang gizi (Balita)	< 10	7,70	100,00
8.	Prevalensi stunting pada baduta	< 12,04	9,81	100,00
9.	Persentase ibu hamil KEK	2,38	3,15	52,94
10.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	91,67	91,67
11.	AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	101	115	85,54
12.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	94,21	94,21
13.	AKB (per 1000 kelahiran hidup)	7	6,6	105,71
14.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,0	85,91	92,38
15.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	79,45	79,45
16.	Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥ 95	88,73	93,40
17.	Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	100	93,40
18.	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas pelayanan kesehatan	9	9,81	109,00
19.	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100	37,82	37,82
20.	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	5	3,12	62,40

21.	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100	100	100,00
22.	Jumlah Kelurahan ODF	2	2	100

Pelaksanaan program SDGs sejalan dengan pelaksanaan program SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan SPM bidang kesehatan yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Implementasi pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh puskesmas yang merupakan ujung tombak yang langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2022, mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran serta memperhatikan kebijakan dan kondisi yang ada maka untuk memperjelas cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui strategi pembangunan kesehatan, kebijakan dan program kerja sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022, yaitu 5 (lima) strategi yaitu:

1. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan
2. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatkan kualitas aparatur

Setiap strategi akan dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang ditetapkan sebanyak 16 dengan pembagian 13 kebijakan di bidang dan 3 kebijakan di sekretariat.

2. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan langkah selanjutnya dalam penyusunan Renstra perangkat daerah setelah penetapan strategi. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun mendatang dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan pada pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas serta fungsi perangkat daerah yang lebih tepat, fokus dan rasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Arah kebijakan membantu untuk memperjelas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan	1. Meningkatkan Pelayanan kesehatan ibu dan Anak di wilayah kerja puskesmas
			2. Pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil kurang gizi
			3. Inovasi Promosi upaya preventif sejak usia dini
			4. Promosi hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
			5. Pemantauan kesehatan makanan dan minuman khususnya yang beredar di sekolah-sekolah
			6. Pengembangan pelayanan konsultasi kesehatan secara pro aktif
			7. Pembinaan dan pemantauan pengelolaan pemukiman bersih (intervensi di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perubahan perilaku melalui penyuluhan dan pemicuan)
			8. Identifikasi dan pencegahan penyakit menular
			9. Peningkatan cakupan imunisasi
			10. Optimalisasi program-program kesehatan inklusif
		2. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasyankes
			2. Pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan rujukan
		3. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan	Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Cimahi
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
			2. Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan
		5. Meningkatkan kualitas aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan

3. Program, Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Puskesmas
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5) Pengadaan Obat, Vaksin
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 20) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - 21) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 22) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

- 23) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 24) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeber
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Selatan
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Utara
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeureum
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cigugur Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cipageran
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Citeureup
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Leuwigajah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Asih
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirkaliki
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padasuka
4. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
5. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
7. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Tabel 3. 4 Rumusan rencana program dan Kegiatan tahun 2022 serta perkiraan maju tahun 2023 Berdasarkan Forum OPD Bidang Kesehatan

RANCANGAN AWAL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai LAKIP PD 2) Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara 3) Kehadiran Pegawai minimal 4) Penyerapan Anggaran	Cimahi	BB (78) 100 Persen > 96 persen 81 persen	64.004.947.848	APBD KOTA	-	BB (78) 100 Persen > 96 persen 81 persen	64.004.947.848
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;		3 dokumen	51.501.800			3 dokumen	51.501.800
01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran Jumlah Dokumen Renja Dinas Jumlah Dokumen Renja Perubahan Jumlah Dokumen Renstra Dinas Jumlah Penyelenggaraan		6 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan	27.001.900			6 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan	27.001.900

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		Forum Perangkat Daerah							
02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Laporan SPM Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen Monev Kinerja		1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	24.499.900			1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	24.499.900
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;		1 dokumen	37.438.582.219			1 dokumen	37.438.582.219
03.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan		380 Orang	37.317.882.219			380 Orang	37.317.882.219
04.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		12 Dokumen	120.700.000			12 Dokumen	120.700.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina;		390 Orang	319.905.000			390 orang	319.905.000
05.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai		100 set	24.905.000			100 set	24.905.000
06.	Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang		23 Pegawai	295.000.000			23 Pegawai	295.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	difasilitasi bimtek							
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;		12 bulan	727.909.100			12 bulan	727.909.100
07.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan		12 bulan	10.002.600			12 bulan	10.002.600
08.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor; Jumlah bulan Penyediaan ATK Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan 12 Bulan 15 Unit	134.307.700			12 bulan 12 Bulan 15 Unit	134.307.700
09.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga		5 set	61.724.300			5 set	61.724.300
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat		12 bulan	133.131.200			12 bulan	133.131.200
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan		12 Bulan	213.751.300			12 Bulan	213.751.300

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi, dan Konsultasi		12 Bulan	174.992.000			12 Bulan	174.992.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;		12 Bulan	204.038.481			12 Bulan	204.038.481
13.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan mebeleur, Jumlah pengadaan lemari, Jumlah pengadaan Rak penyimpanan Medik, Jumlah pengadaan Troly makanan, Jumlah pengadaan Tempat Tidur, Jumlah pengadaan kursi, Jumlah pengadaan meja		1 paket 9 unit 1 paket 2 unit 4 unit 25 unit	204.038.481			1 paket 9 unit 1 paket 2 unit 4 unit 25 unit	204.038.481
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;		12 Bulan	1.262.034.600			12 Bulan	1.262.034.600
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(1).Jumlah Bulan Jasa Air; (2).Jumlah Bulan Jasa Komunikasi;(3).Jumlah Bulan Jasa Listrik;		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	378.000.000			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	378.000.000
15.	Penyediaan Jasa	Jumlah bulan kebersihan		12 Bulan	884.034.600			12 Bulan	884.034.600

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
	Pelayanan Umum Kantor	kantor							
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;	\	12 bulan	2.107.775.000			12 bulan	2.107.775.000
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM Jumlah unit kendaraan Jumlah Unit Kendaraan yang diservice		12 Bulan 27 Unit 3 Unit	994.650.000			12 Bulan 27 Unit 3 Unit	994.650.000
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor		12 Bulan	1.113.125.000			12 Bulan	1.113.125.000
8.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			21.893.201.648				21.893.201.648
18.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka		25836 orang	2.029.174.500			25836 orang	2.029.174.500
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih		20608 orang	1.874.077.000			20608 orang	1.874.077.000
	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah peserta JKN di		12286 orang	1.036.364.500			12286 orang	1.036.364.500

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
	Pelayanan BLUD	wilayah kerja puskesmas Melong Tengah							
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Cigugur tengah		21784 orang	1.714.924.000			21784 orang 1.714.924.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas Cimahi Selatan		21503 orang	1.856.114.000			21503 orang 1.856.114.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran		23964 orang	1.949.459.500			23964 orang 1.949.459.500	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah		24961 orang	2.006.923.300			24961 orang 2.006.923.300	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup		18486 orang	1.388.284.000			18486 orang 1.388.284.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara		29362 orang	2.703.335.348			29362 orang 2.703.335.348	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki		9450 orang	719.287.000			9450 orang 719.287.000	
	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah peserta JKN di		28063 orang	2.216.226.000			28063 orang 2.216.226.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
	Pelayanan BLUD	wilayah kerja Puskesmas Cibeureum							
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber		13269 orang	1.045.759.000			13269 orang	1.045.759.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah		16230 orang	1.353.273.500			16230 orang	1.353.273.500
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1) Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama 2) Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan 3) Prevalensi stunting pada baduta 4) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC) 5) Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin 6) Cakupan keberhasilan		69,23 persen 83 persen 10,80 persen 96 persen 100 Persen 92 Persen 90 Persen 100 Persen	57.454.923.124	APBD KOTA		69,23 persen 83 persen 10,80 persen 96 persen 100 Persen 92 Persen 90 Persen 100 Persen	57.454.923.124

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		Pengobatan TB 7) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 8) Persentase Kasus dan KLB yang ditangani							
9.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;		13 Puskesmas	23.468.488.574			13 Puskesmas 23.468.488.574	
19.	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan gedung baru puskesmas		2 Puskesmas	15.327.292.000			2 Puskesmas 15.327.292.000	
20.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah bulan penyewaan gedung / gudang jumlah ipal yang diperbaiki jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi jumlah puskesmas yang melaksanakan dan pemeliharaan		6 bulan 2 unit 13 puskesmas 2 Puskesmas	2.118.347.675			6 bulan 2 unit 13puskesmas 2 Puskesmas 2.118.347.675	
21.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		2 Puskesmas	832.000.000			2 Puskesmas 832.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
22.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan di pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik		7 unit 3 Puskesmas	1.081.900.000			7 unit 3 Puskesmas	1.081.900.000
23.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis BMHP Jumlah jenis pengadaan obat Jumlah pengadaan Vaksin		60 Jenis 100 Jenis 1 Jenis	4.108.948.899			60 Jenis 100 Jenis 1 Jenis	4.108.948.899
10.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;		13 Puskesmas	33.706.735.580			13 Puskesmas	33.706.735.580
24.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG Jumlah peserta Pertemuan sosialisasi program		11528 orang 5 kegiatan 300 orang	155.690.000			11528 orang 5 kegiatan 300 orang	155.690.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		kesehatan ibu dan anak							
25.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Penguatan program EMAS		11004 Orang 12 Orang	504.000.000			11004 Orang 12 Orang	504.000.000
26.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Jumlah peserta Pelatihan/penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED		10696 Orang 40 Orang	120.000.000			10696 Orang 40 Orang	120.000.000
27.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan reviu PERDA KIBBLA		51988 Orang 1 Laporan	12.099.500			51988 Orang 1 Laporan	12.099.500
28.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pembinaan Sekolah Sehat Pertemuan Program UKS		87223 Orang 12 Sekolah 34 Orang	213.900.000			87223 Orang 12 Sekolah 34 Orang	213.900.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
29.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi Deteksi IVA TEST Jasa Petugas Penunjang P2PTM KESWA Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar Penguatan pandu PTM di FKTP Pertemuan Usia Produktif Sosialisasi hari Pendengaran Sedunia		1250 Orang 1500 Orang 286Orang/hari 368206 Orang 82 Orang 144 Orang 6 Perusahaan	238.991.400			1250 Orang 1500 Orang 286Orang/hari 368206 Orang 82 Orang 144 Orang 6Perusahaan	238.991.400
30.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia Pertemuan Program Lanjut usia		49506 Orang 30 Orang 70 Orang	133.050.000			49506 Orang 30 Orang 70 Orang	133.050.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
31.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes Sosialisasi dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi		175157orang 118 orang 450 orang	103.670.000			175157orang 118 orang 450 orang	103.670.000
32.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi		9638 orang 144 orang 450 orang	103.670.000			9638 orang 144 orang 450 orang	103.670.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah .Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Monitoring dan evaluasi Rakor TPKJM dan NAPZA Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD Penguatan Jejaring Lintas Sektor dan Lintas Program Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS		288 kali 775 orang 1 kali 1 kali 26 kali 1 kali 2 kali	171.222.900		288 kali 775 orang 1 kali 1 kali 26 kali 1 kali 2 kali	171.222.900	
34.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bimbingan teknis program TB ke RS dan Puskesmas .Jumlah orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar Konsultasi Program TB		38 kali 11800 orang 4 Kali 6 Kali 10 Kali	262.313.000		38 kali 11800 orang 4 Kali 6 Kali 10 Kali	262.313.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		Monitoring dan evaluasi Program TB Sosialisasi Program TB							
35.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bimbingan teknis program Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan program HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standa Konsultasi Program Pertemuan Sosialisasi Program HIV		3 Kali 13 kegiatan 14197 Orang 4 Kali 10 Kali	216.230.000			3 Kali 13 kegiatan 14197 Orang 4 Kali 10 Kali	216.230.000
36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penanganan dan Pengiriman Spesimen KLB jumlah peserta konsolidasi dan advokasi PSC Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan KLB Pelaksanaan TGC Pelayanan P3K		160 Sampel 100 Orang 25 Orang 6 Orang 1 Paket	2.671.891.280			160 Sampel 100 Orang 25 Orang 6 Orang 1 Paket	2.671.891.280

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
37.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang ditangani							
38.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi Pengadaan PMT Lokal		70 Orang 198 Paket	1.315.888.400			70 Orang 198 Paket 1.315.888.400	
39.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksana Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelatihan Kader Pos UKK Pengukuran Kebugaraan Jemaah Haji Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Pengukuran Calon Jemaah Haji		286 hari/org 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	60.884.000			286 hari/org 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
40.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah limbah medis yang dikelola Jumlah pelatihan study EHRA		1 kali 12 kali 5484kg/tahun 2 dokumen	475.364.000			1 kali 12 kali 5484 kg/tahun 2 dokumen	475.364.000
41.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah pengadaan pendukung PIK Jumlah Penyuluhan di luar Gedung Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan Jumlah peserta Pembinaan dan monev program		7 Jenis 6 Unit 4 Unit 48 Kali 22 Kali 35 Orang	266.471.400			7 Jenis 6 Unit 4 Unit 48 Kali 22 Kali 35 Orang	266.471.400

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
42.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi program surveilans Jumlah Penemuan Kasus Non PD3I Jumlah pertemuan kegiatan Jemaah haji Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE) Pembuatan Aplikasi e_surveilans Pertemuan Evaluasi program surveilans Pertemuan Kegiatan SKDR penyakit potensial wabah PD3I		13 Kegiatan 12 Laporan 556 Orang 56 Sampe 1 Paket 200 Orang 50 Orang	113.313.300			13 Kegiatan 12 Laporan 556 Orang 56 Sampe 1 Paket 200 Orang 50 Orang	113.313.300
43.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar Jumlah kunjungan laboratorium Jumlah Kunjungan rawat jalan gigi Jumlah pertemuan		4414 KK 55375 Orang 55375 Orang 4 Kali 2 Kali	120.784.000			4414 KK 55375 Orang 55375 Orang 4 Kali 2 Kali	120.784.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		koordinasi PIS-PK Jumlah pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan							
44.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah konsultasi program penyakit menular dan zoonosis Jumlah pertemuan evaluasi program endemik epidemik dan zoonosis Jumlah Pertemuan sosialisasi program endemik epidemik dan zoonosis; Kegiatan pengendalian vektor umlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program (ISPA, Diare dan Hepatitis)		8 kali 3 Kali 3 Kali 80 kali 8 kali	448.278.500			8 kali 3 Kali 3 Kali 80 kali 8 kali	448.278.500
45.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dari keluarga miskin yang dikhitan Jumlah ibu hamil atau bersalin yang mendapatkan pelayanan Jampersal Jumlah kegiatan verifikasi		75 orang 11052 Orang 12 Bulan 13 bulan 12 bulan 58035 orang 4 Kali	17.751.712.000			75 orang 11052 Orang 12 Bulan 13 bulan 12 bulan 58035 orang 4 Kali	17.751.712.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		JKN Jumlah kegiatan verifikatordalam pengelolaan JKN Jumlah Pembayaran Non Kapitasi Jumlah Pembayaran PBI 60% Jumlah Pertemuan JKN Pembayaran Jamkesda Penyusunan Kerjasama dengan RS di luar PBI		12 bulan 2 Kali				12 bulan 2 Kali	
46.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah deklarasi ODF Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota Jumlah pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat Jumlah rapat koordinasi pra ODF Jumlah verifikasi tingkat nasional Pembinaan lingkungan		9 kelurahan 2 kali 1 kali 12 kali 2 kali 3 kali 1 kali	69.190.000			9 kelurahan 2 kali 1 kali 12 kali 2 kali 3 kali 1 kali	69.190.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		bersih dan sehat							
47.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka		25836 orang	509.560.000			25836 orang 509.560.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih		20608 orang	455.460.000			20608 orang 455.460.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah		12286 orang	476.960.000			12286 orang 476.960.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas cigugur tengah		21784 orang	668.445.000			21784 orang 668.445.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas cimahi selatan		21503 orang	500.645.000			21503 orang 500.645.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran		23964 orang	606.785.000			23964 orang 606.785.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah		24961 orang	515.445.000			24961 orang 515.445.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas		18486 orang	546.040.000			18486 orang 546.040.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
		Citeureup							
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara		29362 orang	427.860.000			29362 orang 427.860.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki		9450 orang	579.575.000			9450 orang 579.575.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum		28063 orang	610.393.000			28063 orang 610.393.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber		13269 orang	481.660.000			13269 orang 481.660.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah		16230 orang	632.460.000			16230 orang 632.460.000	
48.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah klinik yang melaksanakan penilaian akreditasi Jumlah Pertemuan Sosialisasi Persiapan Penilaian Akreditasi		2 unit 1 kali	793.841.900			2 unit 1 kali 793.841.900	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
49.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak SD yang mendapat Imunisasi Jumlah Audit KIPI Jumlah peserta pertemuan Audit KIPI Jumlah peserta Pertemuan kegiatan BIAS dan IDL Pengambilan Vaksin Rutin, BIAS, Haji dan Logistik		30000 Orang 10 Kasus 120 Orang 516 Orang 18 Kali	372.992.000			30000 Orang 10 Kasus 120 Orang 516 Orang 18 Kali	372.992.000
11.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				223.962.970				223.962.970
50.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan		6 Dokumen	19.579.000			6 Dokumen	19.579.000
51.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sistem dan jaringan LAN pembuatan aplikasi SIMPUS		13 Kegiatan 1 Paket	129.319.200			13 Kegiatan 1 Paket	129.319.200
52.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah perangkat Sistem Informasi Kesehatan		23 unit	75.064.770			23 unit	75.064.770

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
12.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				55.736.000				55.736.000
53.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Pembinaan RS dan Faskes;		2 kali	-			2 kali	-
54.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas Jumlah laporan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		1 dokumen 1 laporan 2 kali	55.736.000			1 dokumen 1 laporan 2 kali	55.736.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial		95 Persen	17.400.100	APBD KOTA		95 Persen	417.400.100
13.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				-				-

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
55.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				-			-	
14.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM ;		1 dokumen	417.400.100			1 dokumen 417.400.100	
56.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				-			-	
57.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan jabatan fungsional Jumlah pembinaan tenaga kesehatan teladan Jumlah Pertemuan pembinaan SDM per profesi Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan		4 kali 3 kali 9 kali 2 kali	417.400.100			4 kali 3 kali 9 kali 2 kali 417.400.100	
IV.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial		100 Persen	92.415.000			100 Persen 92.415.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
15.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik dan toko obat yang memiliki ijin;			25.000.000			25.000.000	
58.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kantin / warung sekolah Jumlah sarana IRTP yang diaudit Jumlah pertemuan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan Jumlah realisasi pemanfaatan anggaran BOK kefarmasian Jumlah sarana kesehatan yang mendapat bimbingan dan pengawasan		10 kali 10 kali 40 sarana	25.000.000			10 kali 10 kali 40 sarana 25.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
59.	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-			-	
16.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah laporan hasil pemeriksaan makanan dan minuman;			59.490.000			59.490.000	
60.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	Jumlah pertemuan PKP yang Dilaksanakan Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan post market Jumlah sarana IRTTP yang diaudit		2 Kali 50 sampel 100 Sarana	59.490.000			2 Kali 50 sampel 100 Sarana 59.490.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
	untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
17.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Pengawasan ;			7.925.000			7.925.000	
61.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga atau Rumah makan yang telah memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jumlah peserta orientasi Higiene Sanitasi jasa boga atau rumah makan		5 Unit 20 Orang	7.925.000			5 Unit 20 Orang	
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Cakupan Rumah Tangga ber PHBS		54 Persen	4.675.472.400	APBD KOTA		54 Persen	
								4.675.472.400	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
	KESEHATAN								
18.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang mendukung kegiatan Germas Tingkat Kota;			4.472.656.400				4.472.656.400
62.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS Tingkat Kota Pengiriman Kontingen SBH Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR Seminar Implementasi KTR di Sekolah		30 Orang 2 kali 15 Orang 1 Dokumen 50 Sekolah	4.472.656.400			30 Orang 2 kali 15 Orang 1 Dokumen 50 Sekolah	4.472.656.400
19.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokja Kelurahan Siaga yang dibina ;			172.872.000				172.872.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif
63.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pokja Kelurahan Siaga yang dibina .Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga Pembinaan RW Siaga dan evaluasi implementasi inovasi Gernas Promosi kesehatan dan Penggerak masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau		15 unit 60 Orang 15Kelurahan 526 Orang	172.872.000			15 unit 60 Orang 15Kelurahan 526 Orang	172.872.000
20.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM di kelurahan yang dibina;			29.944.000				29.944.000
64.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan UKBM Percontohan Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader		15Kelurahan 150 Orang	29.944.000			15Kelurahan 150 Orang	29.944.000
JUMLAH					126.645.158.472				126.645.158.472

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana kerja tahun 2022 merupakan periode kelima (tahun terakhir) dari pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 ini, program dan kegiatan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Perubahan 2017-2022 dimana pada tahun 2021 telah mengalami perubahan (tahun kedua perubahan), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 114.296.371.573,-, dengan sumber dari APBD sebesar Rp. 95.434.371.573,- (83,49%) dan Dana Kapitasi JKN sebesar 18.862.000.000,- (16,51%), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	APBD KOTA	95.434.371.573 ,-	83,49
2	KAPITASI JKN	18.862.000.000,-	16,51
	TOTAL	114.296.371.573,-	100,00

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 72 sub kegiatan. Uraian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Dokumen RKPD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	URUSAN KESEHATAN								
	BIDANG KESEHATAN								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	64.056.811.099	APBD	78 Nilai	64.056.811.099	Dinas Kesehatan
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	Cimahi	3 Dokumen	51.501.800	APBD	3 Dokumen	51.501.800	Dinas Kesehatan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran		4 Dokumen	27.001.900		4 Dokumen	27.001.900	
		Jumlah Dokumen Renja Dinas		1 Dokumen			1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen			1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen		1 Dokumen			0 Dokumen		

		Renstra Dinas							
		Laporan Anggaran (Siscobikes)		1 Dokumen			1 Dokumen		
		Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		2 Dokumen			2 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen	24.499.900		1 Dokumen	24.499.900	
		Jumlah Dokumen Laporan SPM		1 Dokumen			1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ		2 Dokumen			2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Monev Kinerja		5 Dokumen			4 Dokumen		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Cimahi	1 Dokumen	58.129.740.418	APBD	1 Dokumen	58.129.740.418	Dinas Kesehatan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan		416 orang	58.009.040.418	APBD	416 orang	58.009.040.418	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan		12 Dokumen	120.700.000	APBD	12 Dokumen	120.700.000	
		Jumlah peserta pertemuan penyusunan laporan keuangan		290 orang			290 orang		
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina;	Cimahi	100 Orang	319.905.000	APBD	416 Orang	319.905.000	Dinas Kesehatan

5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai		85 Set	24.905.000	APBD	85 Set	24.905.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek		23 Pegawai	295.000.000	APBD	23 Pegawai	295.000.000	
		Jumlah peserta pembinaan pegawai		390 Pegawai			390 Pegawai		
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	Cimahi	12 Bulan	1.031.815.800	APBD	12 Bulan	1.031.815.800	Dinas Kesehatan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	10.002.600	APBD	12 Bulan	10.002.600	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor		12 Bulan	134.307.700	APBD	12 Bulan	134.307.700	
		Jumlah bulan Penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan		
		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor		1 Unit			1 Unit		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga		1 Paket	61.724.300	APBD	1 Paket	61.724.300	
		Jumlah unit belanja modal peralatan rumah tangga		9 Unit			9 Unit		

10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	183.131.200	APBD	12 Bulan	183.131.200	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	192.650.000	APBD	12 Bulan	192.650.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	450.000.000	APBD	12 Bulan	450.000.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	Cimahi	12 Bulan	254.038.481	APBD	12 Bulan	254.038.481	Dinas Kesehatan
13	Pengadaan Mebel	Jumlah pemeliharaan kursi		0 Unit	254.038.481	APBD	0 Unit	254.038.481	
		Jumlah pengadaan meubelair		20 Unit			20 Unit		
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	Cimahi	12 Bulan	1.562.034.600	APBD	12 Bulan	1.562.034.600	Dinas Kesehatan
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air		12 Bulan	678.000.000	APBD	12 Bulan	678.000.000	
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi		12 Bulan			12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik		12 Bulan			12 Bulan		

15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	884.034.600	APBD	12 Bulan	884.034.600	
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian		18 Orang			18 Orang		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Cimahi	12 Bulan	2.707.775.000	APBD	12 Bulan	2.707.775.000	Dinas Kesehatan
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional		12 Bulan	994.650.000	APBD	12 Bulan	994.650.000	
		Jumlah bulan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional		12 Bulan			12 Bulan		
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan		26 Unit			26 Unit		
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian		10 Orang			10 Orang		

17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor		12 Bulan	1.713.125.000	APBD	12 Bulan	1.713.125.000	
		Jumlah tenaga NON ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian		18 Orang			18 Orang		
		Jumlah Paket pemeliharaan gedung		3 Paket			3 Paket		
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	Cimahi	84,62 persen	47.161.419.374	APBD, APBN	84,62 persen	41.011.419.374	Dinas Kesehatan
		Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan		83 persen			83 persen		
		Prevalensi stunting pada balita		10,70 persen			10,70 persen		
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)		97 persen			97 persen		
		Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin		100 Persen			100 Persen		

		Tingkat Pengobatan TB yang berhasil		90 Persen			90 Persen		
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		90 Persen			90 Persen		
		Persentase Kasus dan KLB yang ditangani		100 Persen			100 Persen		
9	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;	Cimahi	13 Puskesmas	11.058.948.899	APBD, APBN	13 Puskesmas	4.908.948.899	Dinas Kesehatan
19	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan gedung baru puskesmas		2 Unit	6.150.000.000	APBD, APBN	0 Unit	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pembangunan sarana IPAL		1 Unit			0 Unit		
		Jumlah laporan perencanaan IPAL		0 Laporan			0 Laporan		
		Jumlah dokumen manajemen Kontruksi		0 Laporan			0 Laporan		
		Jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmas		12 Bulan			12 Bulan		
		Jumlah dokumen perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas		1 dokumen			0 dokumen		

20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah dokumen perencanaan	0 Dokumen	0	APBD	0 Dokumen	0
		Jumlah dokumen pengawasan	0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 Puskesmas			1 Puskesmas	
		Jumlah peserta rapat persiapan rehabilitasi puskesmas	0 Orang			0 Orang	
21	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit antropometri	0 unit	800.000.000	APBN	0 unit	800.000.000
		Jumlah unit mobil promkes	0 unit			0 unit	
		Jumlah unit mobil Ambulan SPGDT	1 Unit			0 unit	
		Jumlah unit mobil Pick up	1 Unit			0 unit	
		Jumlah unit mobil Box	1 Unit			0 unit	
22	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan	0	0	APBD, APBN	0	0
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik	0			0	
		Jumlah pengadaan alat kesehatan (AKI/AKB)	0			0	

23	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis pengadaan obat Yandas DAK		100 Jenis	4.108.948.899	APBD, APBN	100 Jenis	4.108.948.899	
		Jumlah jenis pengadaan obat Covid		0 jenis			0 jenis		
		Jumlah jenis pengadaan Reagen dan BMHP		0 Jenis			0 Jenis		
		Jumlah program yang mendapatkan pengadaan obat		2 program			2 program		
		Jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan Perbekkes Puskesmas		70 orang			70 orang		
		Jumlah kegiatan bongkar muat obat		100 Kali			100 Kali		
		Jumlah jenis pengadaan obat Yandas APBD		60 Jenis			60 Jenis		
10	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Indikator SPM dengan capaian 83% ;	Cimahi	12 indikator	35.828.507.505	APBD, APBN	12 indikator	35.828.507.505	Dinas Kesehatan
		2) Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN ;		11 persen			1 persen		
		3) Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani		100 persen			100 persen		

		4) Cakupan penyelidikan Epidemiologi yang ditangani		100 persen			100 persen		
		5) Jumlah Kelurahan ODF		6 Kelurahan			6 Kelurahan		
		6) Jumlah bulan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) ;		12 bulan			12 bulan		
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10.689 orang	155.690.000	APBD, APBN	10.689 orang	155.690.000	
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG		20 kali			20 kali		
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Rujukan		7 Perjanjian			7 Perjanjian		
		Jumlah kegiatan pendampingan HPK		600 kali			600 kali		
		Jumlah kunjungan supervisi AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan		0 kali			0 kali		

		Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB	0 orang			0 orang		
		Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes Tingkat pertama & rujukan	0 orang			0 orang		
		Jumlah peserta peningkatan SDM tingkat Kota Cimahi-ANC	0 orang			0 orang		
		Jumlah peserta rapat koordinasi kesehatan	60 Orang			60 Orang		
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.608 orang	666.000.000	APBD, APBN	10.608 orang	666.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	15 orang			15 orang		
		Persentase penyerapan anggaran Jampersal	0 Persen			0 Persen		
		Jumlah peserta surveillance KIA, Audit Maternal Perinatal	0 Orang			0 Orang		
		Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB terkait kespro & KB	0 Orang			0 Orang		

		Jumlah surveillance autopsi verbal kematian itu & bayi		0 Orang			0 Orang		
		Jumlah peserta surveillance response kematian ibu & bayi		0 Orang			0 Orang		
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10.148 orang	120.000.000	APBD, APBN	10.148 orang	120.000.000	
		Jumlah peserta pelatihan/ penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED		40 orang			40 orang		
		Jumlah pendampingan bayi baru lahir resiko tinggi		680 orang			680 orang		
		Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan		0 orang			0 orang		
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		25.380 orang	80.000.000	APBD, APBN	25.380 orang	80.000.000	
		Dokumen reviu PERDA KIBBLA		0 laporan			0 laporan		
		Jumlah peserta kegiatan penguatan guru PAUD tentang		165 orang			165 orang		

		buku KIA & SDIDTK						
		Jumlah peserta sosialisasi PERDA KIBBLA 100 orang		100 orang			0 orang	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		69.586 orang	213.900.000	APBD	69.586 orang	213.900.000
		Jumlah peserta Pertemuan Program UKS		34 orang			34 orang	
		Jumlah Display Data hasil kegiatan UKS		0 unit			0 unit	
		Paket evaluasi sekolah sehat		3 paket			3 paket	
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah ASN yang mendapatkan Deteksi dini Faktor Risiko PTM		1.250 orang	238.991.400	APBD	1.250 orang	238.991.400
		Jumlah orang yang mendapatkan Deteksi IVA Test		1500 orang			1500 orang	
		Jumlah Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa yang difasilitasi		1 orang			1 orang	
		Jumlah penduduk usia 15-59 yang mendapatkan		249.848 orang			249.848 orang	

		<p>pelayanan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Penguatan pandu PTM di FKTP</p> <p>Jumlah peserta kegiatan monev Usia Produktif</p> <p>Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia</p>		<p>82 orang</p> <p>144 orang</p> <p>6 Perusahaan</p>		<p>82 orang</p> <p>144 orang</p> <p>6 Perusahaan</p>		
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah peserta kegiatan bulan pemeriksaan lansia</p> <p>Jumlah alat/bahan kegiatan bulan pemeriksaan lansia</p> <p>Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia</p>	<p>31.781 orang</p> <p>615 orang</p> <p>13 unit</p> <p>80 orang</p>	133.050.000	APBD	<p>31.781 orang</p> <p>615 orang</p> <p>13 unit</p> <p>80 orang</p>	133.050.000	
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat	58.026 orang	103.670.000	APBD	58.026 orang	103.670.000	

		<p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah Peserta Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas fasyankes</p> <p>Jumlah peserta skrining dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi</p>		<p>68 orang</p> <p>3.000 orang</p>			<p>68 orang</p> <p>3.000 orang</p>		
32	<p>Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p> <p>Pelayanan Penderita</p>	<p>Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes</p> <p>Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi</p>		<p>9.815 orang</p> <p>144 orang</p> <p>3.000 orang</p>	103.670.000	APBD	<p>9.815 orang</p> <p>144 orang</p> <p>3.000 orang</p>	103.670.000	
33	<p>Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>Pelayanan Orang dengan</p>	<p>Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah</p>		288 kali	171.222.900	APBD	288 kali	171.222.900	

		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	932 orang			932 orang		
		Jumlah peserta Pelatihan kesehatan jiwa bagi masyarakat	150 orang			150 orang		
		Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD	26 kali			26 kali		
		Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	78 orang			78 orang		
		Jumlah peserta Skrining kesehatan jiwa dan NAPZA bagi anak sekolah	1500 orang			1500 orang		
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	2.602 orang	262.313.000	APBD	2.602 orang	262.313.000	
		Jumlah peserta jejaring internal hospital linkage.	30 orang			30 orang		
		Jumlah Investigasi Kontak	250 orang			250 orang		

		Bulan bulan jasa tenaga Administrator Penyakit Menular		12 bulan			12 bulan						
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi program P2PM		76 orang			76 orang						
		Jumlah peserta Sosialisasi Program TB		64 orang			64 orang						
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah peserta Bimbingan teknis program		57 orang	216.230.000	APBD	57 orang	216.230.000					
		Jumlah bulan jasa pengelola pelayanan program HIV		12 bulan						12 bulan			
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		6.456 orang						6.456 orang			
		Jumlah peserta kegiatan mobile VCT		100 orang						100 orang			
		Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV		19 orang						19 orang			
		Jumlah peserta pemetaan populasi risti		120 orang						120 orang			
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah paket bahan pemeriksaan PCR		2.000 paket			2.671.891.280			APBD, APBN	2.000 paket	2.671.891.280	
		Jumlah paket bahan pemeriksaan rapid		10.000 paket									

		antigen						
		Jumlah obat-obatan untuk P3K		1 paket			1 paket	
		Jumlah BHP untuk P3K		1 paket			1 paket	
		Jumlah shift kegiatan P3K dan Penanggulangan Bencana TGC		122 shift			122 shift	
		Jumlah bulan jasa tenaga administrasi pengelolaan KLB		12 bulan			12 bulan	
		Persentase realisasi anggaran hibah PMI		100 persen			100 persen	
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi		70 orang	574.815.400	APBD, APBN	70 orang	574.815.400
		Jumlah paket pengadaan PMT		198 paket			198 paket	
		Jumlah petugas pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (TTD rematri)		0 Orang			0 Orang	
		Jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (EPPGM)		0 orang			0 orang	

38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kader Pos UKK yang dilatih	30 kader	60.884.000	APBD, APBN	30 kader	60.884.000
		Jumlah Kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	13 kali			13 kali	
		Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji Indonesia	600 orang			600 orang	
		Jumlah ASN yang diperiksa kebugaran	0 Orang			0 Orang	
		Jumlah karyawan instansi swasta yang diperiksa kebugaran	0 Orang			0 Orang	
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan	80 sampel	475.364.000	APBD, APBN	80 sampel	475.364.000
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 bulan			12 bulan	
		Jumlah limbah medis yang dikelola	12.309,46 Kg			12.309,46 Kg	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Survey Study EHRA	0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas sosialisasi teknis TTG SAM rumah	0 Orang			0 Orang	

		tangga bagi sanitarian						
		Jumlah Pemeriksaan sampel sarana air minum masyarakat		0 Sampel			0 Sampel	
		Jumlah peserta pertemuan pengawasan eksternal orientasi higiene sanitasi DAM untuk pengelola/penjamah		0 Orang			0 Orang	
		Jumlah Pemeriksaan sampel Depot Air Minum (DAM)		65 Sampel			65 Sampel	
40	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan		3 Jenis	266.471.400	APBD, APBN	3 Jenis	266.471.400
		Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan		4 Unit			4 Unit	
		Jumlah pengadaan pendukung PIK		0 Unit			0 Unit	
		Jumlah Penyuluhan di luar gedung		40 kali			40 kali	
		Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan		12 kali			12 kali	
		Jumlah peserta Pembinaan dan monev		35 Orang			35 Orang	

			program						
			Jumlah peserta pertemuan Orientasi KPP		0 Orang			0 Orang	
			Jumlah peserta kegiatan kampanye Lokal		0 Orang			0 Orang	
			Jumlah peserta kegiatan Intervensi Promkes		0 Orang			0 Orang	
			Jumlah peserta pertemuan kemitraan		0 Orang			0 Orang	
			Jumlah Peserta pengembangan Kompetensi petugas Promke		30 Orang			30 Orang	
			Jumlah peserta pertemuan pembinaan program promkes		30 Orang			30 Orang	
41	Pengelolaan Kesehatan	Surveilans	Jumlah bulan jasa pengelola administrasi program surveilans		13 Bulan	113.313.300	APBD	13 Bulan	113.313.300
		Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan kasus PD3I dan Pelaporan entry data SKDR		0 Orang				0 Orang	
		Jumlah laporan Penemuan Kasus Non		12 Laporan				12 Laporan	

		PD3I						
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Jemaah haji	556 Orang			556 Orang		
		Jumlah peserta pertemuan Siskohatkes	25 Orang			25 Orang		
		Jumlah perjalanan pengawalan dan penjemputan jemaah haji	4 kali			4 kali		
		Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE)	57 sampel			57 sampel		
		Jumlah peserta pertemuan Evaluasi program surveilans	200 Orang			200 Orang		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi pemeriksaan jemaah haji	0 Orang			90 Orang		
42	Pengelolaan Kesehatan Khusus	Upaya	Jumlah peserta pertemuan pengelolaan upaya kesehatan khusus	160 Orang	120.784.000	APBD	160 Orang	120.784.000
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi PIS-PK	156 Orang			156 Orang	
			Jumlah peserta pertemuan Sistem	100 Orang			100 Orang	

		Pelayanan Rujukan						
		Jumlah bulan jasa tenaga IT kegiatan PIS PK		13 Bulan			13 Bulan	
43	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta pertemuan program endemik epidemik dan zoonosis		120 orang	448.278.500	APBD	120 orang	448.278.500
		Jumlah Kegiatan pengendalian vektor		80 Kali			80 Kali	
		Jumlah kegiatan Pendampingan pelayanan dokter spesialis pada pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas		13 Kali			13 Kali	
		Pengadaan belanja bahan habis pakai alat kedokteran		1 Paket			1 Paket	
		Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis		57 orang			57 orang	
44	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan		75 Orang	18.877.786.325	APBD	75 Orang	18.877.786.325
		Jumlah kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN		13 Bulan			13 Bulan	

		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 60%	84.296 Orang			84.296 Orang		
		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 40%	84.296 Orang			84.296 Orang		
		Jumlah peserta Pertemuan JKN	70 Orang			70 Orang		
		Jumlah bulan Pembayaran Pelayanan Kesehatan maskin di luar peserta JKN	12 Bulan			12 Bulan		
45	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah paket Evaluasi lingkungan bersih dan sehat	3 Paket	69.190.000	APBD	3 Paket	69.190.000	
		Jumlah deklarasi ODF	2 Kelurahan			2 Kelurahan		
		Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	1 Kali			1 Kali		
		Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	15 Kali			15 Kali		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat	30 Orang			30 Orang		
		Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF	100 Orang			100 Orang		
46	Operasional Pelayanan	Jumlah jasa	10 bulan		APBD	10 bulan	8.512.000.000	

	Fasilitas Kesehatan Lainnya	pendampingan konsulen KIPI		8.512.000.000				
		Jumlah paket asuransi KIPI vaksin Covid 19	1 paket			1 paket		
		Jumlah pembelian Trash bag sampah medis	5.142 Pak			5.142 Pak		
		Jumlah jenis bahan habis pakai; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	8 jenis			8 jenis		
		Jumlah bulan jasa tenaga Admininstrasi/tenga ahli IT	10 bulan			10 bulan		
		Jumlah jasa tim vaksinasi Covid 19	1.060 OH			1.060 OH		
48	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	13 Unit/ Puskesmas	800.000.000	APBN	0 Unit/ Puskesmas	800.000.000	
49	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelaksanaan imunisasi BIAS	450 Orang	372.992.000	APBD	450 Orang	372.992.000	
		Jumlah peserta pertemuan Audit KIPI	120 Orang			120 Orang		
		Jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin	140 Orang			140 Orang		

		Persentase realisasi asuransi KIPPI		100 Persen			100 Persen		
		Jumlah peserta sosialisasi persiapan kampanye MR untuk kader		80 Orang			80 Orang		
		Jumlah cenderamata pencahangan kampanye		250 unit			250 unit		
		Jumlah jenis dokumentasi dan periklanan pencahangan kampanye MR		3 Jenis			3 Jenis		
		Jumlah tenaga pendukung pelaksanaan kampanye MR dari kader		4 Orang/Pos			4 Orang/Pos		
		Jumlah tenaga pendukung pelaksanaan kampanye dari IBI/bidan		4 Orang/Puskesmas			4 Orang/Puskesmas		
11	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	Cimahi	98 Persen	223.962.970	APBD	98 Persen	223.962.970	
50	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah jenis dokumen buku Profil Kesehatan		2 Jenis	19.579.000	APBD	2 Jenis	19.579.000	
		Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil		36 Orang			36 Orang		

51	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN		13 Bulan	129.319.200	APBD	13 Bulan	129.319.200	
		Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan aplikasi SIMPUS		92 Orang			92 Orang		
		Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan Blue Print		44 Orang			44 Orang		
		Jumlah pengadaan Harddisk eksternal		0 Unit			0 Unit		
		Jasa Tenaga Pembuatan Blue Print		8 Bulan			8 Bulan		
52	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan perangkat Komputer		5 Unit	75.064.770	APBD	5 Unit	75.064.770	
		Jumlah Pengadaan Printer		4 Unit			4 Unit		
		Jumlah Pengadaan perangkat Laptop		0 Unit			0 Unit		
		Jumlah Perlengkapan Video Conference		0 Set			0 Set		
		Jumlah Camera Video		0 Set			0 Set		
12	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	Cimahi	4 Puskesmas	50.000.000	APBD, APBN	4 Puskesmas	50.000.000	
53	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas	Jumlah peserta pertemuan Penilaian		45 Orang	50.000.000	APBD, APBN	45 Orang	50.000.000	

	Kesehatan	Kinerja Puskesmas							
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan		45 Orang			45 Orang		
		Jumlah paket penilaian Puskesmas berprestasi		3 Paket			3 Paket		
		Jumlah puskesmas yang mengikuti pertemuan mutu puskesmas		6 Puskesmas			6 Puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang mengikuti Monev mutu dan akreditasi puskesmas		6 Puskesmas			6 Puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan mutu akreditasi puskesmas		6 Puskesmas			6 Puskesmas		
		Jumlah peserta pertemuan Akreditasi untuk Puskesmas		0 Orang			0 Orang		
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	Cimahi	100 Persen	2.542.400.100	APBD	100 Persen	417.400.100	Dinas Kesehatan
13	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM ;	Cimahi	1 dokumen	2.542.400.100	APBD	1 dokumen	417.400.100	Dinas Kesehatan

	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
54	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Nakes Non ASN yang mendapatkan insentif		8.250 OH	2.125.000.000	APBD,	8.250 OH	-	
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta pembinaan jabatan fungsional		45 Orang	417.400.100	APBD	45 Orang	417.400.100	
		Jumlah peserta pembinaan tenaga kesehatan teladan		90 Orang			90 Orang		
		Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDM per profesi		175 Orang			175 Orang		
		Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan		2 kali			2 kali		
		Jumlah peserta pelatihan SDM kesehatan		26 Orang			26 Orang		
		Jumlah jasa pengelola program informasi SDM		12 Bulan			12 Bulan		
		Jumlah tenaga yang mendapat insentif Covid		0 Orang			0 Orang		
		Jumlah peserta		50 Orang			50 Orang		

		pelatihan SDM kesehatan							
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standard	Cimahi	100 Persen	125.925.000	APBD	100 Persen	125.925.000	Dinas Kesehatan
14	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan	Cimahi	100 Persen	30.000.000	APBD	100 Persen	30.000.000	
56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	Cimahi	60 Orang	30.000.000	APBD	60 Orang	30.000.000	
		Jumlah peserta pembinaan PJAS		70 Orang			70 Orang		
15	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang diaudit	Cimahi	100 Persen	88.000.000	APBD	100 Persen	88.000.000	
57	Pengendalian dan	Jumlah peserta		120 Orang		APBD	120 Orang	88.000.000	

	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	pertemuan PKP Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan penyuluhan		50 Sampel 120 Sarana	88.000.000		50 Sampel 120 Sarana		
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persenatse TPM yang mendapat rekomendasi	Cimahi		7.925.000	APBD		7.925.000	
58	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah peserta pelatihan laik Hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM)		50 Orang	7.925.000	APBD	50 Orang	7.925.000	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	Cimahi	54 Persen	409.816.000	APBD	54 Persen	409.816.000	Dinas Kesehatan

17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	Cimahi	11 Persen	207.000.000	APBD	11 Persen	207.000.000
59	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH		30 Orang	207.000.000	APBD	30 Orang	207.000.000
		Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS		2 Kali			2 Kali	
		Pengiriman Kontingen SBH		15 Orang			15 Orang	
		Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah peserta TOT implementasi KTR		19 Orang			19 Orang	
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	Cimahi	62 Persen	172.872.000	APBD	62 Persen	172.872.000
60	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta pembinaan Pokja Kelurahan Siaga Sehat		70 Orang	172.872.000	APBD	70 Orang	172.872.000
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga		70 Orang			70 Orang	
		Pembinaan RW Siaga dan evaluasi implementasi inovasi		15 Kelurahan			15 Kelurahan	

		Germas							
		Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau		380 Orang			380 Orang		
		Jumlah peserta Seminar Hari Tanpa Tembakau Sedunia		60 orang			60 orang		
19	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan UKBM	Cimahi	120 Orang	29.944.000	APBD	120 Orang	29.944.000	
61	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader Jumlah peserta pembinaan UKBM		80 orang 40 Orang	29.944.000	APBD	80 orang 40 Orang	29.944.000	
TOTAL BIDANG DAN SEKRETARIAT					114.296.371.573			106.021.371.573	

	PUSKESMAS								
1	Puskesmas Padasuka				2.029.174.500			2.029.174.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum 3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Cimahi	78 Nilai 100 Persen 100 Persen	2.029.174.500	BLUD	78 Nilai 100 Persen 100 Persen	2.029.174.500	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80		100 Persen	2.029.174.500	BLUD	100 Persen	2.029.174.500	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		12.918 orang	2.029.174.500	BLUD	12.918 orang	2.029.174.500	Puskesmas Padasuka

		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,70			81,70		
2	Puskesmas Melong Asih				1.874.077.000			1.874.077.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.874.077.000	BLUD	78 Nilai	1.874.077.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.874.077.000	BLUD	100 Persen	1.874.077.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih yang dilayani (50% dari total peserta		10.304 orang	1.874.077.000	BLUD	10.304 orang	1.874.077.000	Puskesmas Melong Asih

		JKN terdaftar)							
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		79,14			79,14		
3	Puskesmas Melong Tengah				1.036.364.500			1.036.364.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.036.364.500	BLUD	78 Nilai	1.036.364.500	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.036.364.500		100 Persen	1.036.364.500	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Tengah yang dilayani		6.143 orang	1.036.364.500		6.143 orang	1.036.364.500	Puskesmas Melong Tengah

		(50% dari total peserta JKN terdaftar)							
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,48			81,48		
4	Puskesmas Cigugur Tengah				1.714.924.000			1.714.924.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.714.924.000	BLUD	78 Nilai	1.714.924.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.714.924.000		100 Persen	1.714.924.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cigugur		10.892 Orang	1.714.924.000		10.892 Orang	1.714.924.000	Puskesmas Cigugur Tengah

		Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)							
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		79,8			79,8		
5	Puskesmas Cimahi Selatan				1.856.114.000			1.856.114.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.856.114.000	BLUD	78 Nilai	1.856.114.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.856.114.000		100 Persen	1.856.114.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja		10.752 orang	1.856.114.000		10.752 orang	1.856.114.000	Puskesmas Cimahi

		Puskesmas Cimahi Selatan yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)							Selatan
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		82,35			82,35		
6	Puskesmas Cipageran				1.949.459.500			1.949.459.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.949.459.500	BLUD	78 Nilai	1.949.459.500	Dinas Kesehatan
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.949.459.500		100 Persen	1.949.459.500	

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cipageran yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		11.982 orang			11.982 orang	1.949.459.500	Puskesmas Cipageran
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,17			81,17		
7	Puskesmas Cimahi Tengah				2.006.923.300			2.006.923.300	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	2.006.923.300	BLUD	78 Nilai	2.006.923.300	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan	Cimahi	100 Persen	2.006.923.300		100 Persen	2.006.923.300	

		nilai minimal 80							
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		12.481 orang	2.006.923.300		12.481 orang	2.006.923.300	Puskesmas Cimahi Tengah
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		82,27 Nilai			82,27 Nilai		
8	Puskesmas Citeureup				1.388.284.000			1.388.284.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.388.284.000	BLUD	78 Nilai	1.388.284.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		

	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.388.284.000		100 Persen	1.388.284.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Citeureup yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		1) 9.243	1.388.284.000		1) 9.243	1.388.284.000	Puskesmas Citeureup
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		2) 82,21			2) 82,21		
9	Puskesmas Cimahi Utara				2.703.335.348			2.703.335.348	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	2.703.335.348	BLUD	78 Nilai	2.703.335.348	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian		100 Persen			100 Persen		

		kompetensi							
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	2.703.335.348		100 Persen	2.703.335.348	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		14.681	2.703.335.348		14.681	2.703.335.348	Puskesmas Cimahi Utara
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		82,04			82,04		
10	Puskesmas Pasirkaliki				719.287.000			719.287.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	719.287.000	BLUD	78 Nilai	719.287.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen					

		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	719.287.000		100 Persen	719.287.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		4.725	719.287.000		4.725	719.287.000	Puskesmas Pasirkaliki
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,42			81,42		
11	Puskesmas Cibeureum				2.216.226.000			2.216.226.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	2.216.226.000	BLUD	78 Nilai	2.216.226.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi		100 Persen					

		umum							
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	2.216.226.000		100 Persen	2.216.226.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		14.032 orang	2.216.226.000		14.032 orang	2.216.226.000	Puskesmas Cibeureum
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		90,56			90,56		
12	Puskesmas Cibeber				1.045.759.000			1.045.759.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.045.759.000	BLUD	78 Nilai	1.045.759.000	
		2) Persentase Unit Kerja yang		100 Persen			100 Persen		

		mendapatkan pelayanan administrasi umum							
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.045.759.000		100 Persen	1.045.759.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeber yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		6.635 orang	1.045.759.000		6.635 orang	1.045.759.000	Puskesmas Cibeber
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		82,61			82,61		
13	Puskesmas Leuwigajah				1.353.273.500			1.353.273.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	78 Nilai	1.353.273.500	BLUD	78 Nilai	1.353.273.500	

	DAERAH	2) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100 Persen			100 Persen		
		3) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100 Persen			100 Persen		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	Cimahi	100 Persen	1.353.273.500		100 Persen	1.353.273.500	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1) Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Leuwigajah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)		8.115 orang	1.353.273.500		8.115 orang	1.353.273.500	Puskesmas Leuwigajah
		2) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		81,51 Nilai			81,51 Nilai		
	JUMLAH PUSKESMAS				21.893.201.648			21.893.201.648	

BAB V

PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan tahun 2020 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 merupakan hasil tahun ketiga dari pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022 yang menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam perjalanannya pelaksanaan Renja tahun 2020 tentunya mengalami perubahan, terkait perubahan indikator dan target pada program dan kegiatan di tahun 2020, besarnya anggaran yang harus menyesuaikan dengan dokumen Renstra, RKPD dan RPJMD Kota Cimahi. Selanjutnya hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada renja tahun 2020 akan menjadi bahan evaluasi terhadap Renstra dan RPJMD yang sekiranya akan mengalami perubahan kembali.

Dokumen penyusunan rencana kerja tahun 2022 merupakan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Kesehatan 2017-2022, dimana pada tahun 2021 mengalami perubahan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Kota Cimahi 2017-2022. Selain itu rencana kerja tahun 2022 juga mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Jawa Barat 2018-2023 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 merupakan upaya mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, yang diharapkan pada pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun di lingkup Dinas Kesehatan pada khususnya.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2022 ini. Kemudian Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan di Kota Cimahi.



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH
KOTA CIMAHI